

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

*DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU*



**BANTU
RAKYAT**

**BENGKULU
BUMI MERAH PUTIH**

**bangga
#melayani
bangsa**

BerAKHLAK
berorientasi Pelayanan • unggul dalam kompetensi
harmonis • layak • dapat dipercaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan kerja program dan kegiatan dalam rentang waktu lima tahunan. Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu dalam rangka mewujudkan **Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan**

Demikian Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 disusun dengan harapan dapat menjadi acuan kerja dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan serta dapat menjawab semua permasalahan dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu.

Bengkulu, September 2025



KEPALA
DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI BENGKULU

he
Ir. ARIF GUNADI, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19680719 199303 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. BAB	II-
1	
P E N D A H U L U A N.....	II-1
I.1 LATAR BELAKANG	II-1
I.2 LANDASAN HUKUM.....	II-3
I.3 MAKSUD DAN TUJUAN	II-4
I.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	II-5
II. BAB II.....	III-
1	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
II.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	III-1
II.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD.....	III-1
II.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	III-7
II.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	III-9
II.2 PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	III-
20	
II.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	III-21
II.2.2 Isu Strategis	III-22
III. BAB III.....	IV-26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	IV-26
III.1 TUJUAN RENSTRA PD 2025-2029	IV-26
III.2 SASARAN RENSTRA PD 2025-2029	IV-26
III.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	IV-30
III.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029	IV-30
IV. BAB IV.....	V-32
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	V-32
IV.1 URAIAN PROGRAM	V-32

IV.2 URAIAN KEGIATAN..... V-34

IV.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET,
DAN PAGU INDIKATIF V-45

IV.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH..... V-56

IV.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH..... V-56

IV.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI
(IKK)..... V-57

V. **BAB V..... VI-58**

P E N U T U P..... VI-58

DAFTAR GRAFIK

Tabel 1 1 Sistematika Penulisan Renstra PD 2025-2029.....II-5

Tabel 2 1 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024.....III-8

Tabel 2 2 Kendaraan Operasional Lingkup Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu Tahun 2024III-8

Tabel 2 3 Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan
Pangan Tahun 2024III-9

Tabel 2 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi BengkuluIII-11

Tabel 2 5 Ketersediaan energi dan protein 2020-2024III-13

Tabel 2 6 Proporsi Ketersediaan Energi Protein dan Lemak tahun 2020-
2024.....III-13

Tabel 2 7 Capaian Ketersediaan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-
2024.....III-14

Tabel 2 8 Perkembangan stabilitas harga pangan di Provinsi Bengkulu
Tahun 2020-2024.....III-15

Tabel 2 9 Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan di
Provinsi Bengkulu kurun waktu 2020-2024III-16

Tabel 2 10 Capaian Konsumsi Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024
.....III-19

Tabel 2 11 Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2020-2024....
..... III-
20

Tabel 2 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat DaerahIII-21

Tabel 2 13 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
..... III-
24

Tabel 3 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD IV-28

Tabel 3 2 Tujuan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi Bengkulu IV-29

Tabel 3 3 Tahapan Renstra Perangkat Daerah..... IV-30

Tabel 3 4 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan
Pangan Provinsi Bengkulu IV-31

Tabel 4 1 Program Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Bengkulu V-33

Tabel 4 2 Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RENSTRA
Perangkat Daerah V-36

Tabel 4 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Indikatif .. V-46

Tabel 4 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam rangka mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah V-56

Tabel 4 5 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)..... V-57

Tabel 4 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) V-57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Bengkulu, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu
Nomor 21 Tahun 2024.III-6

Gambar 2 2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan 2024III-7

Gambar 2 3 Grafik Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk Provinsi
Bengkulu Tahun 2020-2024.III-12

Gambar 2 4 Persentase Ketersediaan Energi pada kelompok pangan nabati
dan hewani kurun waktu 2020-2024III-13

Gambar 2 5 Grafik PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024III-14

Gambar 2 6 Stabilitas harga beras pada kurun waktu 2020-2024.....III-16

Gambar 2 7 Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi kurun waktu
2020-2024III-17

Gambar 2 8 Grafik Skor Pola pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan
kurun waktu 2020-2024.....III-18

Gambar 2 9 Capaian Konsumsi energi (kkal/kap/hari) penduduk Provinsi
Bengkulu kurun waktu 2020-2024.....III-18

Gambar 2 10 Grafik Capaian dan Target Konsumsi Protein kurun waktu
2020-2024III-19

Gambar 4 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ SubkegiatanV-32

BAB I

P E N D A H U L U A N

II.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 dan sesuai ketentuan Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka tiap-tiap OPD yang ada di Provinsi Bengkulu diharuskan untuk segera melakukan penyusunan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan perencanaan yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehubungan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategik. Pencapaian tujuan sesuatu organisasi yang dikelola secara modern hanya akan dicapai jika menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara baik. Salah satu fungsi manajemen adalah fungsi perencanaan.

Terkait dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Visi, Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan. Pelaksanaannya dirancang selama 5 (lima) tahun sekaligus dirumuskan indikator keberhasilannya, sehingga arah dan keluarannya jelas serta dapat dievaluasi setiap tahun sebagai bahan perbaikan rencana dan pelaksanaan program tahun berikutnya.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2029 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025 – 2029 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Bengkulu dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu

5 (lima) tahun tersebut. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Dinas Ketahanan Pangan yang memuat prioritas program dan kegiatan. Renstra Dinas Ketahanan Pangan juga berpedoman dengan Renstra Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI tahun 2025-2029. Target yang akan dicapai pada Renstra Perangkat Daerah sebagai pendukung dalam pelaksanaan Renstra BAPANAS. Tujuan Badan Pangan Nasional adalah Meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri, Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi dan Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial-ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu mempunyai tugas yaitu : 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 3) Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 4) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 5) pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan; 6) penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 7) pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 8) pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan 9) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan.

Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 272 Ayat (1), yang menyatakan bahwa "*Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman*

pada RPJMD”, dan pada Ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah”. Dinas Ketahanan Pangan dalam hal ini selaku Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pada bidang Pangan wajib menyusun Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan selama 5 (lima) tahunan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada sehingga tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

II.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029;
21. Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu;

II.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029 ditetapkan dengan maksud (1) sebagai penjabaran atas RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, (2) memberikan arah/strategi pembangunan, sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai, serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan ketahanan pangan daerah selama lima tahun ke depan. (3) sebagai indikator keberhasilan Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan pembangunan di bidang Pangan.

Tujuan disusunnya RENSTRA Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah untuk :

1. Harmonisasi perencanaan pembangunan ketahanan pangan secara terpadu, terfokus dan terprogram.
2. Sebagai pedoman dan acuan dalam kebijakan program strategis pembangunan ketahanan pangan.
3. Membangun sistem perencanaan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu yang mandiri, terpadu, inovatif dan profesional, terarah, terukur dan sejalan dengan pembangunan nasional, serta sesuai dengan Visi dan Misi gubernur terpilih 2025 – 2029.
4. Memberikan informasi arah kebijakan dan perencanaan pembangunan ketahanan pangan kepada masyarakat.
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan dan LAKIP.

II.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Tata cara penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan provinsi Bengkulu di dasarkan pada Pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yang berbunyi, *“Tahapan penyusunan Ranwal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Ranwal RPJMD”*. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Sistematika Renstra PD 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) Bab, sesuai dengan tabel 1.1 berikut :

Tabel 1 1 Sistematika Penulisan Renstra PD 2025-2029

No Bab	Jucul Bab	Sistematika Inmendagri No. 2 Tahun 2025
Bab I	PENDAHULUAN	1.1 Latar Belakang 1.2 Dasar Hukum Penyusunan 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan
Bab II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah 2.1.2 Sumber daya Perangkat Daerah 2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah 2.2.2 Isu Strategis
Bab III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	3.1 Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029 3.2 Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.3 Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 3.4 Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029
Bab IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA	4.1 Uraian Program; 4.2 Uraian Kegiatan; 4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;

No Bab	Jucul Bab	Sistematika Inmendagri No. 2 Tahun 2025
	PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	4.4 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah; 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
BAB V	PENUTUP	Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunar erdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

II.1. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah kurun waktu 2021-2024.

III.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah di tetapkan dalam Peraturan Gubernur nomor 21 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah sebagai unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang ketahanan pangan, dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
- f. Penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan

- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang ketahanan pangan.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Seretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Tim Kerja ketersediaan Pangan;
 - 2. Tim Kerja Kerawanan Panga;
 - 3. Tim Kerja Sumber daya Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Tim Kerja Distribusi Pangan;
 - 2. Tim Kerja Harga Pangan;
 - 3. Tim Kerja Cadangan Pangan;
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana terdiri dari :
 - 1. Tim Kerja Konsumsi Pangan;
 - 2. Tim Kerja Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
 - 3. Tim Kerja Keamanan Pangan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (UPTD BPMKP), membawahi 3 Seksi terdiri dari :
 - 1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2. Kepala Seksi Mutu Pangan;
 - 3. Kepala Seksi Teknis Sertifikasi;
 - 4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dijabarkan sebagai berikut :

- 1) **Sekretariat**, dipimpin oleh Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisasi permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretariat;
 - b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Ketahanan Pangan;
 - c. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;

- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Ketahanan Pangan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan;
- e. Pelayanan informasi publik di bidang ketahanan pangan;
- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Ketahanan Pangan;
- h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

- 2) **Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; meningkatkan kualitas sumber daya manusia; memberikan bimbingan teknis terhadap masyarakat petani dan kelompok tani; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- c. Pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Bimbingan teknis dan supervisi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- f. Pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- h. Pengkoordinasian dan fasilitasi penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- i. Mengikuti rapat teknis ketersediaan, penanganan kerawanan pangan, dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang ketersediaan dan kerawanan pangan; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

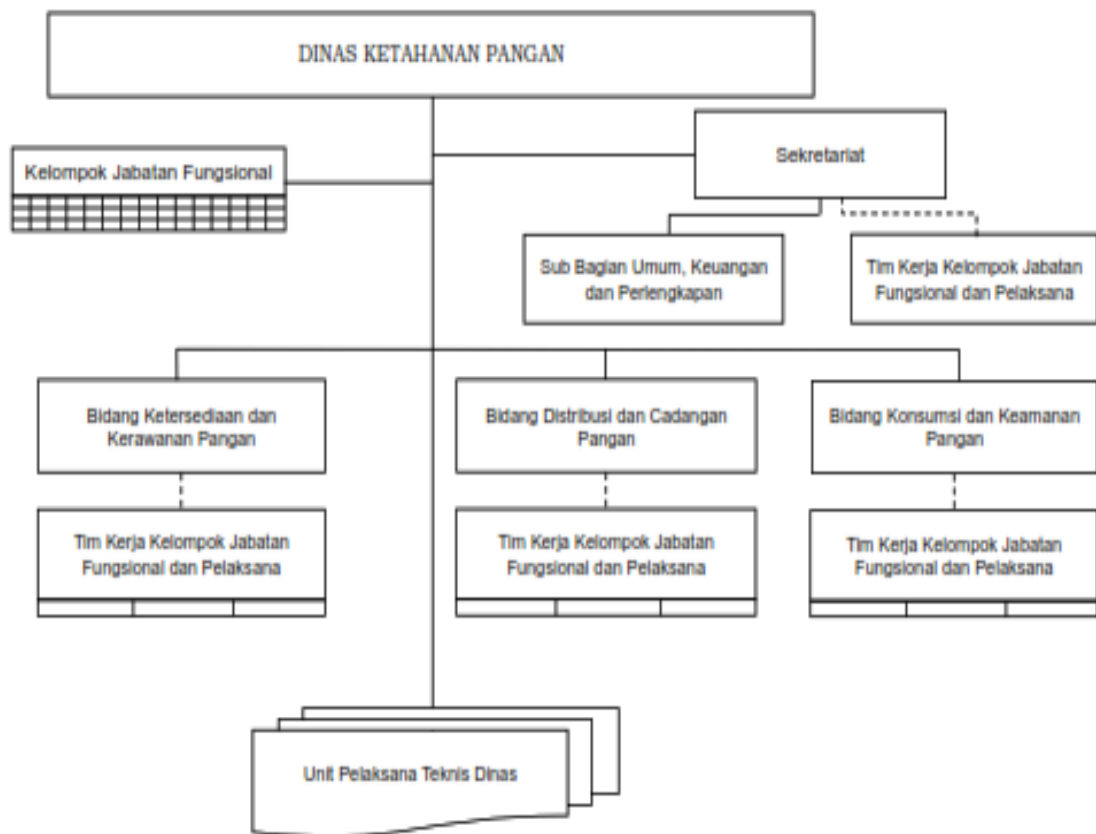
3) **Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang distribusi pangan;
- b. Pelaksanaan koordinasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- c. Pengarahan dalam penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis terhadap masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD dan supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- f. Penyiapan pematapan program di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- h. Pengkoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- i. Penyiapan pengelolaan cadangan pangan provinsi dan pemeliharaan keseimbangan cadangan pangan provinsi;
- j. Perumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- k. Penyediaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- l. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
- m. Mengikuti rapat teknis distribusi pangan, cadangan pangan dan pengawasan harga pangan sesuai dengan disposisi kepala dinas;
- n. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;

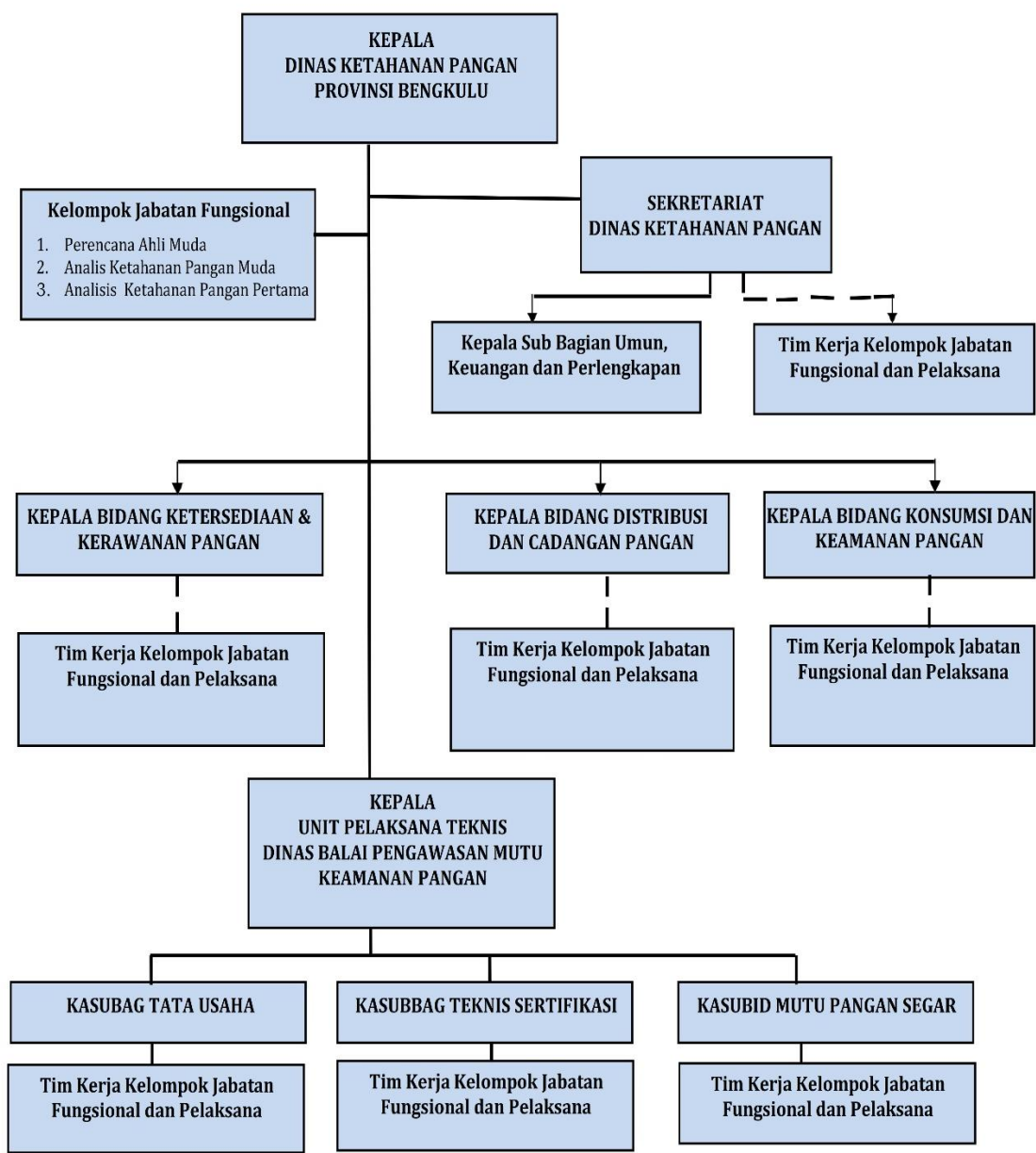
- o. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
 - p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas;
- 4) **Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan**, dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan daerah; mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung; melakukan bimbingan teknis kepada masyarakat umum, petani, kelompok tani dan pelaksana UPTD; memantau, mengawasi, mengevaluasi dan menyusun laporan berkenaan dengan konsumsi dan keamanan pangan.
- Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - d. Pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pemantapan program di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - g. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - h. Penyajian informasi dan pelaksanaan dukasi penganekaragaman konsumsi pangan
 - i. Penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - j. Mengikuti rapat teknis konsumsi dan keamanan pangan sesuai disposisi Kepala Dinas;
 - k. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - l. Penyusunan laporan pelaksanaan bidang konsumsi dan keamanan pangan;
 - m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;
- 5) **Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan (UPTD BPMKP)**, dipimpin oleh Kepala UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis pengawasan mutu dan sertifikasi pangan segar, registrasi pangan segar asal tumbuhan, dan rekomendasi keamanan pangan untuk ekspor.

- Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi :
- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas UPTD BPMKP;
 - b. Pelaksanaan administrasi kegiatan pelayanan UPTD BPMKP;
 - c. Pelayanan penetapan tugas dan fungsi personil sesuai kompetensi;
 - d. Pelaksanaan penjaminan mutu dan keamanan pangan;
 - e. Penetapan dan peningkatan sistem manajemen mutu pangan segar;
 - f. Pembinaan dan pengawasan pangan segar;
 - g. Pelaksanaan pengembangan laboratorium penguji mutu dan keamanan pangan;
 - h. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan pelayanan UPTD BPMKP terhadap pelaku usaha/perusahaan;
 - i. Pelaksanaan pelayanan informasi teknis kualitas mutu dan keamanan pangan sesuai standarisasi nasional Indonesia;
 - j. Pelaksanaan koordinasi pengujian mutu dan keamanan pangan segar;
 - k. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP;
 - l. Pembinaan jabatan fungsional;
 - m. Pelaksanaan menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan;
 - n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan UPTD BPMKP; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya;



Gambar 2 1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Bengkulu Nomor 21 Tahun 2024.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024



Gambar 2 2 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan 2024

III.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Keberhasilan penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas serta berbagai kegiatan program pembangunan ketahanan pangan yang dikelola Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia yang tersedia. Pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu didukung oleh 46 pegawai, dengan komposisi sebagai berikut (Tabel 2.1):

- a. Tingkat pendidikan : SMP 0%, SMA 6,5%, Diploma-3 2,2%, Sarjana Strata-1 (S1) 63% dan Sarjana Strata-2 (S2) 28,3%;
- b. Kepangkatan : Golongan II 4%, Golongan III 65 % dan golongan IV 30%;
- c. Usia Pegawai : Kurang dari 26 tahun 0 persen, 26-35 tahun 0 persen, 36-45 tahun 20 persen, 46 – 50 tahun 72 persen dan lebih dari 51 tahun 9 persen.

Tabel 2 1 Perkembangan Pegawai Negeri Sipil Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 – 2024

Uraian	Jumlah Pegawai (Orang)					Pertumbuhan (%)
	2020	2021	2022	2023	2024	
1. Tingkat Pendidikan						
a. SMP						-
b. SMA	3	3	3	3	3	0 %
b. Sarjana Muda dan D3	1	1	1	1	1	0 %
c. Sarjana Strata-1 dan D4	33	33	33	28	29	-12%
d. Strata-2 Magister	14	14	14	14	13	-7%
Jumlah	51	51	51	46	46	
2. Kepangkatan						
a. Golongan II	4	4	4	4	2	-50%
b. Golongan III	33	33	33	28	30	-9%
c. Golongan IV	14	14	14	14	14	0%
3. Usia Pegawai						
a. < 26 Tahun	0	0	0	0	0	0%
b. 26 – 35 Tahun	0	0	0	0	0	0%
c. 36 – 45 Tahun	12	12	12	9	9	-25%
d. 46 – 50 Tahun	35	35	35	33	33	-6%
e. > 50 Tahun	4	4	4	4	4	0%

Sumber : Sekretariat DTP Prov. Bengkulu 2024, diolah

Berdasarkan golongan kepangkatan di Dinas Ketahanan Pangan di tahun 2024, ASN yang berada di : golongan II sebanyak 2 (dua) orang, golongan III sebanyak 30 (tiga puluh) orang dan golongan IV sebanyak 14 (empat belas) orang.

Kendaraan operasional di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2024 berjumlah 24 (dua puluh empat) unit dalam keadaan baik, terdiri 9 (sembilan) unit kendaraan roda 4 (empat), dan 15 (lima belas) unit kendaraan roda 2 (dua). Kendaraan Operasional pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2 2 Kendaraan Operasional Lingkup Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2024

No	Jenis Kendaraan	Unit
1	Roda 4	9
2	Roda 2	15
Jumlah		24

Sumber : KIB_DTP 2024, diolah

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan secara terperinci di OPD Dinas Ketahanan Pangan tersedia beberapa gedung beserta sarana prasarana pendukungnya, dapat ditampilkan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2 3 Gedung dan Sarana Prasarana Pendukung Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Kondisi		Keterangan
				Baik	Rusak	
1	Lahan: Pekarangan dan Kantor	Ha	0,44	0,44		
2	Sumber Daya Manusia: - ASN - Non ASN (Tenaga HOK)	Orang Orang	46 14			
3	Gedung/Bangunan	Unit	4	√ √ √ √	-	- Gedung Utama ± 325 - Gedung TTIC : ± 80 - Gedung OKKPD ±250 - Tempat Parkiran ±36
4	Kendaraan Operasional : - Roda 4 - Roda 2	Unit Unit	9 15	9 15		Total ada 10 unit kendaraan Roda 4 dan Roda 15 di OPD DTP 1 Hibah Bapanas 1 Hibah Bank Indonesia
5	- Komputer - Laptop	Unit Unit	4 27	24	4 3	4 unit Komputer rusak 3 unit Labtop rusak

Sumber : KIB_DTP 2024, diolah

III.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Pelayanan, terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja penunjang pelayanan lainnya. Penetapan IKU dilakukan berdasarkan prioritas apa yang akan dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. IKU Dinas Ketahanan Pangan periode tahun 2020-2024 telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, dengan rincian sebagai berikut :

- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi
- Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
- Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan

Tingkat capaian indikator kinerja pelayanan telah tercapai sangat baik dengan tingkat capaian rata-rata 100%, hal ini disebabkan atas keberhasilan dari program/ kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Pencapaian kinerja beserta target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2020 – 2024 sumber dana APBD secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

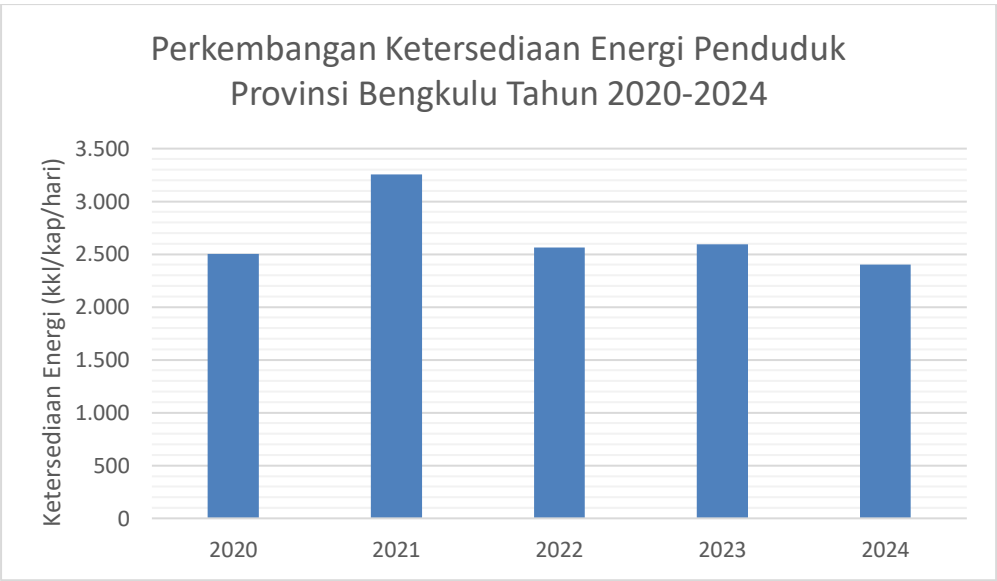
Tabel 2 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 - 2024

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran	Target					Realisasi					Persentase Capaian				
				2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tujuan	Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Indikator Tujuan : Indeks Ketahanan Pangan	65	65	65,7	65,8	65,9	65	65	65,7	69,9	69,9	100	100	100	100	100
	Sasaran :	1 Meningkatkan Konsumsi dan Diversifikasi Pangan	1 Nilai Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi pangan	83	83	83	83,5	84	82,6	83	89,7	89,3	91	99,52	100	100	100	100
		2 Meningkatkan Persentase Tingkat Keamanan Pangan Segar yang Dikonsumsi	2 PersentaseTingkat Keamanan Pangan Segar yang Dikonsumsi	86	86	84,5	85	85,5	86	86	83,7	89,5	90	100	100	100	100	100
		3 Meningkatkan ketersediaan Diversifikasi Pangan	3 Nilai Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan	82	82	5	5	5	82	82	5	37	11,8	100	100	100	100	100
		4 Peningkatan Keamanan Pangan Segar	4 Angka Stabilitas Harga Pangan	4,45	4,45	85	85	85	4,94	4,45	98	86,6	78,6	100	100	100	100	100

Pelayanan urusan pangan tahun 2020-2024 pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu yaitu aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan, serta konsumsi dan keamanan pangan dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Ketersediaan Pangan

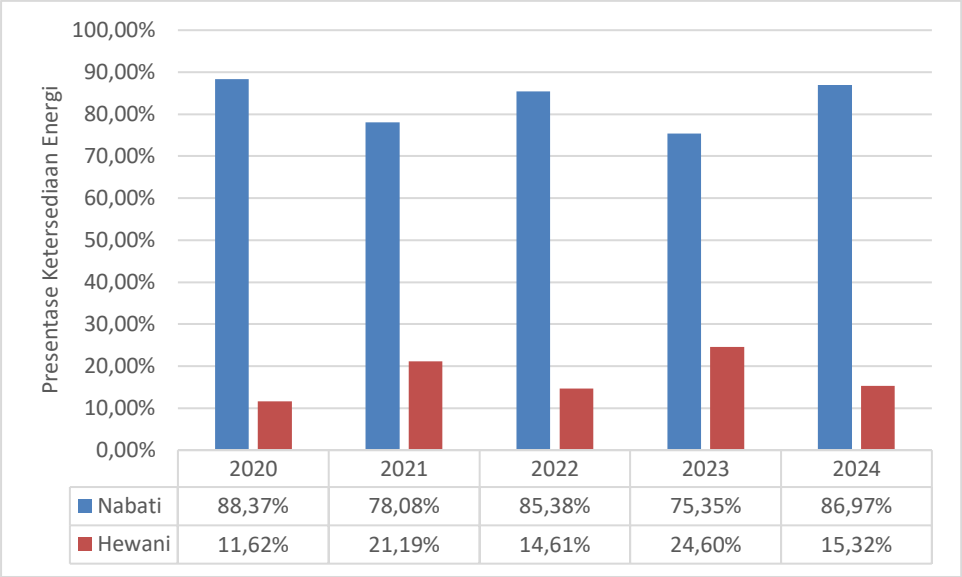
Ketersediaan pangan penduduk setiap tahun tergambar dalam Neraca Bahan Makanan (NBM) Provinsi Bengkulu. NBM merupakan tabel yang memuat informasi mengenai situasi penyediaan/pengadaan, penggunaan dan ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah pada kurun waktu tertentu. Perkembangan total ketersediaan energi (kkal/kap/hari) Provinsi Bengkulu selama kurun waktu 2020-2024 dapat di lihat pada grafik berikut ini :



Gambar 2 3 Grafik Perkembangan Ketersediaan Energi Penduduk Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.

Berdasarkan Gambar di atas, ketersediaan energi penduduk Provinsi Bengkulu sudah melebihi anjuran Angka Kecukupan Energi (AKE) sebesar 2.400 kkal/kap/hari (WNPG 2012), begitu juga dengan Ketersediaan Protein telah melebihi Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari (WNPG 2012).

Kelompok pangan nabati memberikan kontribusi energi terbesar selama kurun waktu 2020-2024 dibandingkan dengan kelompok pangan hewani. Perkembangan kelompok pangan yang memberikan kontribusi energi terbesar dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 2 4 Persentase Ketersediaan Energi pada kelompok pangan nabati dan hewani kurun waktu 2020-2024

Selengkapnya Ketersediaan energi dan protein dapat di lihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2 5 Ketersediaan energi dan protein 2020-2024

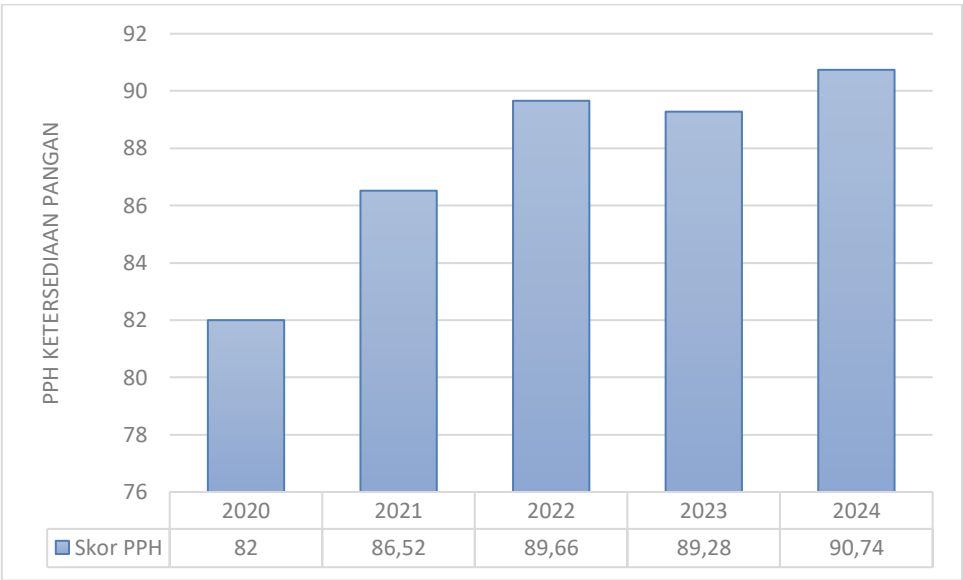
No	Tahun	Energi		Protein	
		Ketersediaan (kkal/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)	Ketersediaan (gram/kap/hr)	Tingkat Ketersediaan (%)
1	2020	2.503	104,2	95,05	150,87
2	2021	3.254	135,5	121,75	193,25
3	2022	2.566	106,9	83,45	132,46
4	2023	2.593	108,04	154,44	245,14
5	2024	2.403	100,13	94,17	149,48

Tabel 2 6 Proporsi Ketersediaan Energi Protein dan Lemak tahun 2020-2024.

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ketersediaan energi (kkal/kap/hr)	2.503	3.254	2.566	2.593	2.403
	Proporsi energi nabati (%)	88,37%	78,08%	85,38%	75,35%	86,97%
	Proporsi energi hewani (%)	11,62%	21,19%	14,61%	24,60%	15,32%
2	Ketersediaan Protein (gr/kap/hr)	95,05	121,75	83,45	154,44	94,17
	Proporsi Protein nabati (%)	49,75%	30,35%	41,86%	24,35%	49,06%
	Proporsi Protein hewani (%)	50,24%	69,63%	41,59%	75,65%	50,97%
3	Ketersediaan Lemak (gr/kap/hr)	37,59	72	54,76	41,44	43,30
	Proporsi Lemak nabati (%)	73,61%	47,9%	68,04%	71,59%	73,02%
	Proporsi Lemak hewani (%)	9,92%	53,52%	17,50%	27,67%	26,97%

Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, dan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keberagaman pangan suatu wilayah. PPH adalah susunan keragaman pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH konsumsi pangan merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat.

Analisis PPH Ketersediaan Pangan sangat dibutuhkan untuk melihat keberagaman ketersediaan pangan yang dibutuhkan guna mengarahkan masyarakat agar mengkonsumsi pangan yang beragam, karena secara alamiah masyarakat akan mengkonsumsi apa yang tersedia dilingkungan dan di pasaran. Hasil analisis PPH Ketersediaan Pangan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar 2.5 berikut.



Gambar 2 5 Grafik PPH Ketersediaan Pangan Tahun 2020-2024

Tabel 2 7 Capaian Ketersediaan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Kelompok Pangan	PPH (data t-1)					PPH
		2020	2021	2022	2023	2024	Ideal
1	Padi-padian	25,0	22,56	25	25	25	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	1,03	1,8	1,72	1,71	2,5
3	Pangan Hewani	22,8	24	24	24	24	24,0
4	Minyak dan Lemak	1,7	5	5	5	5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	0,0	0,97	0,46	0,52	0,23	1,0
6	Kacang-kacangan	1,1	0,47	0,41	1,05	5,41	10,0
7	Gula	0,4	2,5	2,55	1,99	1,43	2,5
8	Sayur dan Buah	30	30	29,83	30	27,97	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Skor PPH	82,0	86,52	89,66	89,28	90,74	100

Berdasarkan skor PPH Ketersediaan Pangan dari tahun 2020-2024, skor PPH ketersediaan belum mencapai skor ideal yaitu 100. Skor PPH 100 merupakan skor ideal keberagaman ketersediaan pangan. Secara umum skor PPH Ketersediaan Pangan sudah cukup baik dan target yang ditetapkan setiap tahunnya tercapai, akan tetapi belum mencapai skor PPH Ideal. Untuk mencapai skor PPH Ideal, perlu untuk meningkatkan ketersediaan Umbi-umbian, Pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan serta gula.

B. Distribusi dan Cadangan Pangan

Ketersediaan pangan yang ada agar dapat dikonsumsi oleh masyarakat adalah dengan memastikan jalur distribusi pangan yang lancar sehingga pangan dapat di akses dengan mudah. Salah satu indikator keterjangkauan pangan masyarakat adalah harga pangan, dan harga pangan menjadi salah satu elemen penting dalam ekonomi dan berkontribusi terhadap inflasi. Terjadinya gejolak harga pangan menunjukkan adanya gejala terganggunya distribusi pangan. Hal ini disebabkan karena kurangnya pasokan atau meningkatnya permintaan. Ketidacukupan pasokan pangan disuatu wilayah dapat menjadi indikator tidak meratanya distribusi pangan antar wilayah.

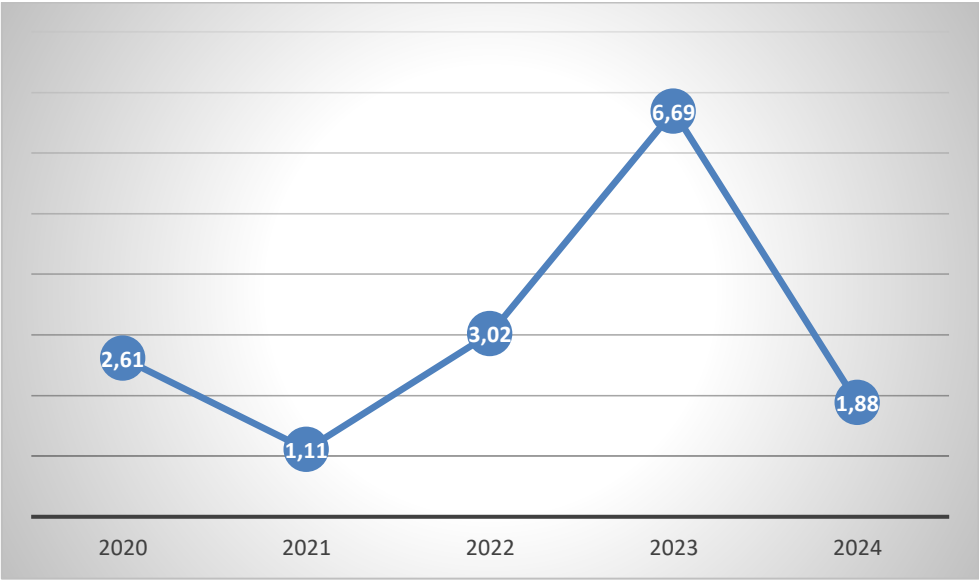
Adanya gejolak harga akan berpengaruh terhadap akses pangan masyarakat, dan apabila berlangsung secara terus menerus akan menimbulkan potensi terjadinya kerawanan pangan. Pemerintah Provinsi Bengkulu mengupayakan agar komoditas pangan strategis tetap stabil. Fluktuasi harga pangan selama kurun waktu tertentu diukur dari besarnya nilai koefisien variasi (CV), semakin kecil CV maka harga akan semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Provinsi Bengkulu dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut.

Tabel 2 8 Perkembangan stabilitas harga pangan di Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Komoditas	Koefisien Variasi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Beras Premiun	2,13	0,61	3,22	6,86	1,80
2	Beras Medium	2,61	1,11	3,02	6,69	1,88
3	Beras Termurah	2,60	0	0	0	0
4	Jagung Pipilan Kering	4,26	0	0	0	0
5	Kedelai Biji Kering	3,79	10,02	4,33	7,38	7,12
6	Gula Pasir Lokal	12,68	0.52	2,5	5.34	1,46
7	Bawang Merah	21,91	11,40	22,12	18,40	24,94
8	Cabe Merah Keriting	39,15	32,10	32,1	39,34	35,26
9	Daging Ayam Ras	9,08	5,65	11,47	10,14	8,06
10	Telur Ayam Ras	3,37	3,79	8,67	4,06	2,49
11	Daging Sapi Murni	0,78	0,98	3,33	1,68	1,39
12	Minyak goreng	2,40	11,83	20,11	5,65	3,78
13	Tepung Terigu	0,81	2,72	8,69	1,61	1,14

Pada tabel terlihat bahwa komoditas yang mengalami harga yang tidak stabil adalah gula pasir lokal, bawang merah, cabe merah keriting dan daging ayam ras. Dengan demikian harus diantisipasi untuk tahun-tahun berikutnya.

Angka stabilitas harga pangan pada tingkat konsumen (beras) pada kurun waktu 2020-2024 dapat di lihat pada gambar 2.6 berikut ini.



Gambar 2 6 Stabilitas harga beras pada kurun waktu 2020-2024

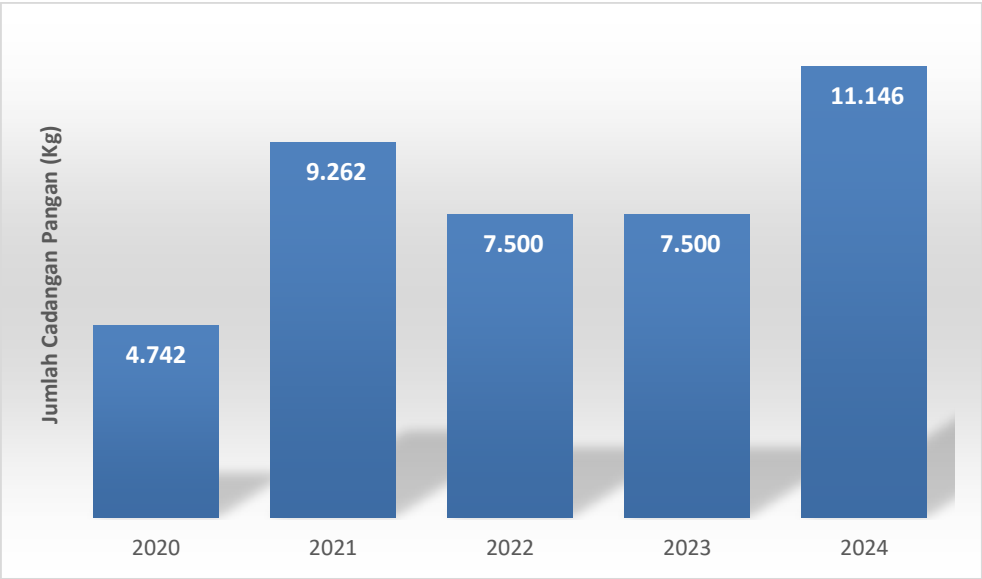
Berdasarkan Gambar 2.6, untuk harga beras tahun 2020 sampai 2022 dalam kondisi stabil karena berada dibawah angka 5%, sedangkan tahun 2023 sebesar 6,69% terjadi ketidak stabilan harga, hal ini disebabkan karena stok beras di pasaran berkurang di pasaran. Dengan kebijakan pemerintah pada tahun 2024 kembali stabil di angka 1,88%.

Selain stabilnya harga pangan upaya dalam menjaga keterjangkauan pangan, cadangan pangan pemerintah sangat dibutuhkan dalam suatu wilayah untuk menjaga ketersediaan pangan terutama beras. Provinsi Bengkulu melaksanakan pengadaan cadangan pangan selama kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2 9 Jumlah Pengadaan dan Penyaluran Cadangan Pangan di Provinsi Bengkulu kurun waktu 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Stok Awal (kg)	48.684	53.426	61.540	69.040	73.007
2	Pengadaan (kg)	4.742	9.262	7.500	7.500	11.146
3	Penyaluran (kg)	0	1.148	Na	3.533	754
4	Stok Akhir (kg)	53.426	61.540	69.040	73.007	83.399

Perkembangan pengadaan cadangan pangan pemerintah provinsi Bengkulu dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Gambar 2.7 berikut ini.

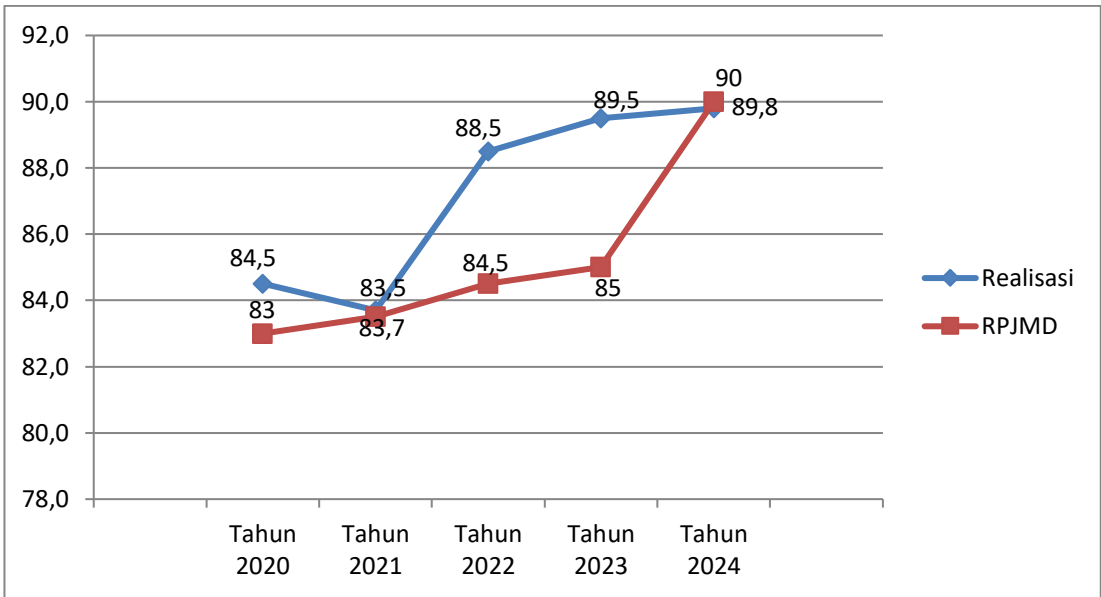


Gambar 2 7 Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Provinsi kurun waktu 2020-2024

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam kurun waktu 2020 – 2024 belum mencapai jumlah cadangan beras yang harus disiapkan yaitu sebesar 200 ton. Cadangan pangan tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan akibat terjadinya kerawanan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, dan keadaan darurat lainnya. Sampai pada tahun 2024 cadangan beras baru dikeluarkan sebesar 5.435 kg. Sehingga sampai tahun 2024 Provinsi Bengkulu memiliki cadangan pangan sebesar 83.399 Kg yang tersimpang di gudang penyimpanan Bulog Kanwil Bengkulu.

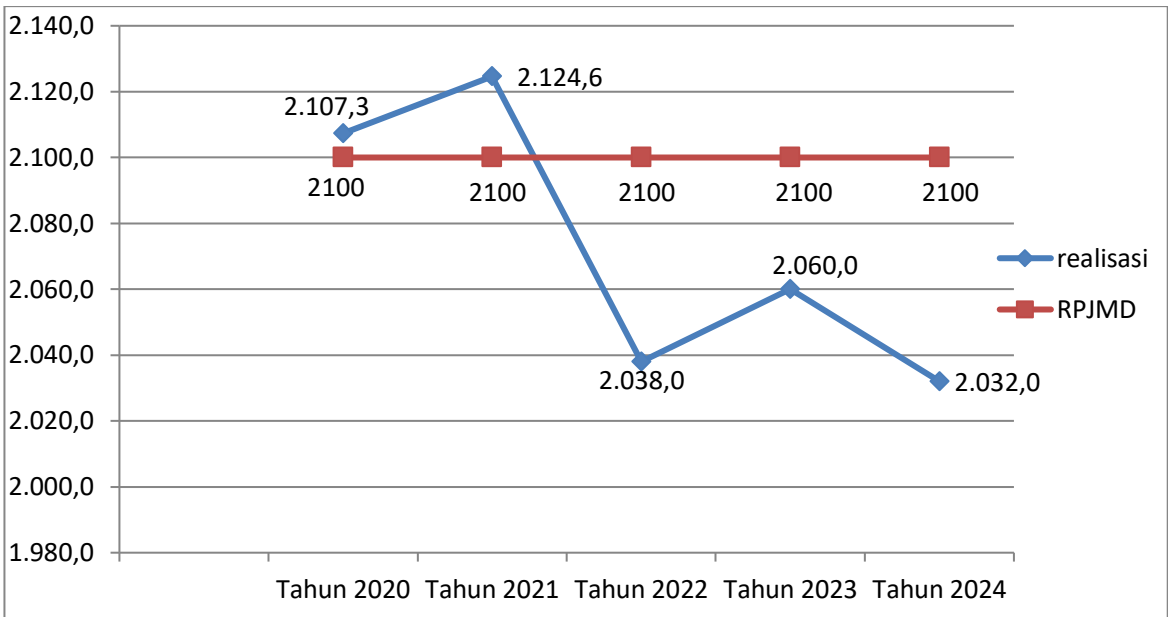
C. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Pangan yang tersedia dalam jumlah yang cukup dan dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat, tetapi jika dikonsumsi tidak dalam jumlah yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman maka pembangunan ketahanan pangan belum tercapai karena belum sampai pada tingkat perseorangan. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan sangat penting, kuantitas diukur dari jumlah pangan yang dikonsumsi dan kualitas pangan dari keragaman kelompok pangan yang dikonsumsi yang diukur dengan skor Pola pangan Harapan (PPH) konsumsi pangan. Kualitas konsumsi pangan yang diukur dari skor PPH merupakan komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Provinsi Bengkulu dari tahun 2020-2024 memiliki skor PPH yang cukup baik. Kuantitas dan kualitas konsumsi pangan Provinsi Bengkulu kurun waktu 2020-2024 dapat dilihat pada gambar grafik 2.8 berikut.



Gambar 2 8 Grafik Skor Pola pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan kurun waktu 2020-2024

Capaian skor PPH Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir cenderung mengalami kenaikan. Skor PPH tahun 2024 sebesar 89,8 (naik 0,3 poin dari tahun 2023), Capaian tersebut dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi sayur dan buah yang memiliki kontribusi besar dalam capaian skor PPH. Skor PPH belum mencapai target RPJMD tahun 2024 dengan capaian 89,8 (target 90).

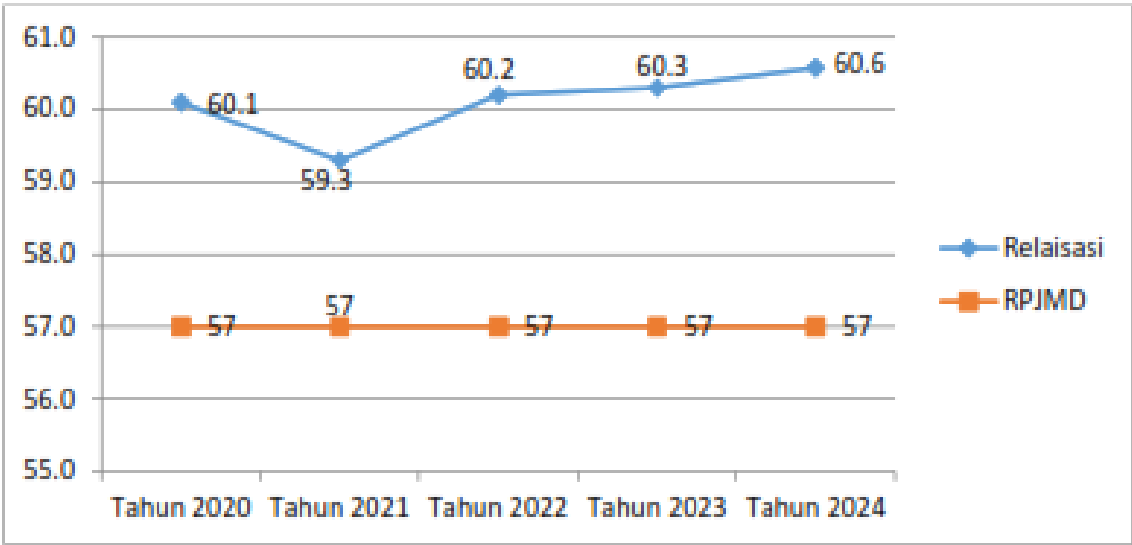


Gambar 2 9 Capaian Konsumsi energi (kcal/kap/hari) penduduk Provinsi Bengkulu kurun waktu 2020-2024

Target konsumsi energi sesuai RPJMD belum tercapai pada tahun 2022-2024. Tahun 2024, konsumsi energi sebesar 2.032 kkal/kap/hari, sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, yaitu 2.060 kkal/kap/hari, yang dipengaruhi oleh hampir semua kelompok pangan yaitu Padi-padian, umbi-umbian, minyak dan lemak, kacang-kacangan serta sayur dan buah.

Meskipun capaiannya dibawah standar AKE 2100 kkal/kap/hari, namun masih dikategorikan normal (Depkes 2003), dengan tingkat Konsumsi Energi 96,8%.

Rata-rata konsumsi protein penduduk Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir telah melebihi anjuran konsumsi protein sebesar 57 gram/kap/hari. Kontribusi terbesar konsumsi protein bersumber dari jenis pangan nabati, untuk tahun 2024 kontribusinya sebesar 63,19%, protein hewani sebesar 36,81%. Capaian dan Target Konsumsi Protein 2020-2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.



Gambar 2 10 Grafik Capaian dan Target Konsumsi Protein kurun waktu 2020-2024

Capaian konsumsi pangan berdasarkan Pola Pangan Harapan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024 berdasarkan kelompok pangan dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2 10 Capaian Konsumsi Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024

No	Kelompok Pangan	PPH (data t-1)					PPH
		2020	2021	2022	2023	2024	Ideal
1	Padi-padian	25,0	22,56	25	25	25	25,0
2	Umbi-umbian	1,0	1,03	1,8	1,72	1,71	2,5
3	Pangan Hewani	20,0	24	24	24	24	24,0
4	Minyak dan Lemak	5,0	5	5	5	5	5,0
5	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,97	0,46	0,52	0,23	1,0
6	Kacang-kacangan	3,9	0,47	0,41	1,05	5,41	10,0
7	Gula	1,8	2,5	2,55	1,99	1,43	2,5
8	Sayur dan Buah	24,8	30	29,83	30	27,97	30,0
9	Lain-lain	-	-	-	-	-	-
	Skor PPH	82,6	86,52	89,66	89,5	90,74	100

Berdasarkan tabel di atas, konsumsi kelompok padi-padian, minyak dan lemak, serta buah biji berminyak sudah cukup baik. Sedangkan konsumsi pada kelompok umbi-umbian, pangan hewani, kacang-kacangan, gula, serta sayur dan buah masih kurang. Konsumsi kelompok padi-padian didominasi oleh konsumsi beras. Masih belum beragamnya konsumsi pangan selaras dengan jumlah pangan yang tersedia berdasarkan PPH Ketersediaan Pangan

pada kelompok-kelompok pangan tertentu. Namun demikian pada kelompok pangan hewani secara ketersediaan masih kurang dan konsumsi pangan hewani juga masih kurang. Pada kelompok Sayur dan Buah, secara ketersediaan sudah cukup tetapi dilihat dari tingkat konsumsi sayur dan buah masih kurang. Sehingga diperlukan strategi-strategi untuk peningkatan produksi pangan hewani agar tersedia cukup dan terjangkau untuk dapat dikonsumsi oleh penduduk, serta sosialisasi agar penduduk gemar makan umbi-umbian, sayur dan buah, pangan hewani dan kacang-kacangan.

Pengawasan pangan segar yang diedarkan di pasar dilakukan agar produk pangan yang beredar aman untuk dikonsumsi, sesuai dengan parameter cemaran mikroba, kandungan residu pestisida dan logam berat (dibawah BMR). Dalam melakukan pengawasan keamanan pangan segar dikelompokkan menjadi 2 kelompok yaitu (1) pengawasan keamanan pangan segar sebelum diedarkan (*Pre Market*), (2) pengawasan keamanan segar di peredaran (*Post Market*).

Pengawasan keamanan pangan segar *Pre Market* adalah pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD). Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap keamanan pangan segar yang dilakukan sebelum diedarkan ke konsumen. Pengawasan dilakukan mulai di produksi, panen, grading, dan packing. Bentuk pengawasan keamanan pangan sebelum diedarkan yang dilakukan oleh OKKPD Provinsi Bengkulu adalah sertifikasi prima 3 dan PSAT. Selama kurun waktu 2020-2024 telah diterbitkan sertifikat Prima 3 bagi pelaku usaha beberapa komoditi di Provinsi Bengkulu (tabel 2.11).

Tabel 2 11 Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2020-2024

Uraian	2020		2021		2022		2023		2024	
	Jml sam pel yang diuji	Jml sampel aman	Jml sam pel yang diuji	Jml sampel aman	Jml sam pel yang diuji	Jml sampel aman	Jml sam pel yang diuji	Jml sampel aman	Jml sam pel yang diuji	Jml sampel aman
Prima 3	15	15	7	5	8	6	28	25	6	
PSAT	1	1	4	4	1	1	2	2	2	

Pengawasan keamanan pangan di peredaran (*Post Market*) merupakan pengawasan yang dilakukan oleh Tim terhadap pangan segar yang beredar di pasar, dan yang tidak dapat disimpan lama. Pengujian dilakukan secara kualitatif melalui uji cepat kandungan formalin dan pestisida.

III.2 PERMASALAHAN PELAYANAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam menentukan permasalahan dan isu strategis perangkat daerah menggunakan panduan yang terdapat pada Instruksi Menteri Dalam Negeri (INMENDAGRI) Nomor 2 tahun 2025. Dengan variabel mengetahui potensi yang ada pada perangkat daerah, permasalahan yang di hadapi perangkat daerah, isu pada KLHS yang relevan pada perangkat daerah, isu global, isu nasional dan regional serta isu strategis yang ada pada perangkat daerah.

III.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan ketahanan pangan sangat dipengaruhi beberapa faktor baik faktor internal dan faktor eksternal. Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi berperan besar dalam upaya menghadapi dinamika pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu diantaranya kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana, serta koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan gambaran umum kondisi Provinsi Bengkulu selama lima tahun terakhir, terdapat beberapa aspek pembangunan ketahanan pangan yang telah mengalami kemajuan. Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan ke depan masih banyak permasalahan baik pada aspek ketersediaan pangan, penanganan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, serta kelembagaan ketahanan pangan yang perlu ditangani agar tujuan pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu dapat terwujud.

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Pemetaan permasalahan dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut ini.

Tabel 2 12 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	1. Masih tingginya konsumsi beras masyarakat provinsi bengkulu. 2. Masih rendahnya konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur2an dan buah.	1. Konsumsi beras masyarakat provinsi Bengkulu masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun. 2. Data skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat konsumsi belum mencapai 100, yang artinya belum menunjukkan keragaman dan keseimbangan pangan. 3. Berdasarkan skor PPH diketahui bahwa keberagaman konsumsi pangan hewani dan sayuran masih dibawah nilai ideal	1. Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan. 2. Keberagaman konsumsi harus diimbangi dengan keragaman ketersediaan pangan, dimana berdasarkan PPH ketersediaan, pangan hewani dan sayuran/buah juga masih kurang. Sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan pangan dan konsumsi pangan
2	Luas lahan sawah semakin berkurang	Ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras sangat tinggi	Mengoptimalisasi pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumber daya lokal.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Perlu mengantisipasi kejadian yang disebabkan oleh kerawanan pangan kronis dan kerawanan pangan transien	Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat dalam upaya menyediakan cadangan pangan saat terjadi paceklik untuk para anggotanya dan saat terjadi bencana.	Pembangunan infrastruktur lumbung pangan dan optimalisasi pengelolaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan.
4	Hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (<i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>) Provinsi Bengkulu belum digunakan secara optimal dalam penanganan daerah rentan rawan pangan	Penanganan terpadu antar instansi yang terkait, sesuai dengan hasil analisis FSVA, belum dilaksanakan secara optimal	Mengoptimalkan Rekomendasi hasil FSVA, Pengampu kebijakan dapat mengetahui langkah – langkah yang harus di ambil dalam mengurangi daerah rentan rawan pangan.

III.2.2 Isu Strategis

Perumusan isu strategis pembangunan ketahanan pangan didasari atas pertimbangan terhadap masalah yang dihadapi, tantangan, dan potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Adapun isu-isu strategis tersebut adalah :

1. Ketersediaan Pangan

Ketersediaan pangan sangat tergantung pada luas lahan pertanian yang ada, saat ini masalah yang dihadapi banyaknya alih fungsi lahan pertanian pangan ke lahan pertanian non pangan. Luas lahan sawah yang semakin berkurang berpengaruh terhadap produksi padi, dimana ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras masih sangat tinggi. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan yang berbasis pada sumberdaya lokal.
2. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menjaga ketersediaan pangan terutama saat terjadinya bencana dan adanya perubahan musim tanam padi. Penguatan cadangan pangan pemerintah dan juga penguatan cadangan pangan masyarakat perlu dilakukan agar pangan tersedia disepanjang waktu. Hal ini harus diantisipasi dengan pembangunan lumbung pangan dan optimalisasi pengelolaan lumbung pangan masyarakat secara berkelanjutan.
3. Pemanfaatan Pangan

Pemanfaatan pangan merupakan kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). Data skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tingkat konsumsi belum mencapai 100, yang artinya belum menunjukkan keragaman dan keseimbangan pangan. Berdasarkan skor PPH diketahui bahwa keberagaman konsumsi pangan hewani dan sayuran-sayuran masih

kurang. Konsumsi beras masyarakat provinsi Bengkulu masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun.

Budaya masyarakat yang belum terbiasa mengganti nasi sebagai makanan pokok dengan bahan lain. Sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan penerapan tentang diversifikasi konsumsi pangan. Keberagaman konsumsi harus diimbangi dengan keragaman ketersediaan pangan, dimana berdasarkan PPH ketersediaan, pangan hewani dan sayuran/buah juga masih kurang. Sehingga perlu keseimbangan antara ketersediaan pangan dan konsumsi pangan.

4. Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

Dalam upaya penanganan daerah rentan rawan pangan, hasil Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) Provinsi Bengkulu belum digunakan secara optimal dalam penanganan daerah rentan rawan pangan. Koordinasi lintas sektor terkait sangat dibutuhkan dalam penanganan daerah rentan rawan pangan karena beberapa aspek/indikator berkaitan dengan instansi tertentu.

Berdasarkan panduan dari Inmendagri No 2 Tahun 2025 tentang Pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Strategis (RENJA) 2025-2029 di atur juga cara pemetaan permasalahan dan isu strategis dalam penyusunan RENSTRA PD berdasarkan variabel isu pada KLHS yang relevan pada perangkat daerah, isu global, isu nasional dan regional serta isu strategis yang ada pada perangkat daerah di tampilkan pada tabel 2.13 berikut ini.

Tabel 2 13 Permasalahan Pelayanan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

POTENSI DAERAH YG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	Telaahan RTRW dan KLHS (ISU KLHS YG RELEVAN)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YG RELEVAN DGN PD			Isu-Isu Strategis Instansi/PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
- Koordinasi antar Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota di Bengkulu dalam rangka meningkatkan Ketersediaan pangan, pengendalian harga pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan penguatan keamanan pangan. - Pemanfaatan data dan informasi pangan antar Kabupaten/Kota di Bengkulu untuk meingkatkan produksi dan ketersediaan pangan. - Peingkatan pemahaman SDM di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten/ Kota d Provinsi Bengkulu	1. Konsumsi beras masyarakat provinsi Bengkulu masih cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari angka konsumsi beras selama tiga tahun terakhir masih diatas 100 kg/kapita/tahun 2. Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat dalam upaya menyediakan cadangan pangan saat terjadi paceklik untuk para anggotanya dan saat terjadi bencana 3. Penanganan terpadu antar instansi yang terkait, sesuai dengan hasil analisis FSVA,	KLHS: Pentingnya integrasi KLHS dalam mewujudkan Kedaulatan dan Kemandirian Pangan berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan. . Peningkatan Ketahanan Pangan dilakukan dengan upaya mengantisipasi terjadinya : (1) konversi lahan pertanian ke lahan non pertanian, (2) menurunnya tingkat kesuburan lahan pertanian, (3) ketersediaan air yang semakin terbatas akibat adanya kerusakan hutan, persaingan dengan indutri dan pemukiman, (4)	Agenda Global seperti SDGs, perubahan iklim, dan transformasi digital mendorong peningkatan ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan	Peningkatan ketahanan pangan nasional, kedaulatan pangan, dan kemandirian pangan	Dinamika pembangunan lintas kabupaten/kota di Bengkulu yang masih belum sinkron serta kesenjangan pembangunan antar wilayah	1. Pengendalian Inflasi Pangan, melalui : - Operasi Pasar: Melakukan operasi pasar secara masif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mencegah spekulasi harga. - Penyaluran Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP): Menyalurkan beras SPHP ke wilayah yang mengalami disparitas harga tinggi. - Program Bantuan Pangan: Memberikan bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjaga daya beli dan mengurangi dampak inflasi pangan. - Gerakan Pangan Murah (GPM): Memperbanyak

POTENSI DAERAH YG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	Telaahan RTRW dan KLHS (ISU KLHS YG RELEVAN)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YG RELEVAN DGN PD			Isu-Isu Strategis Instansi/PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
		penggunaan lahan yang belum optimal.				pelaksanaan GPM untuk menyediakan pangan dengan harga terjangkau.
	belum dilaksanakan secara optimal .					2. Swasembada Pangan Target Swasembada Pangan: Mencapai swasembada pangan pada tahun 2025 dan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Kontribusi Dinas Ketahanan Pangan disini sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah dengan menyediakan cadangan pangan yang mencukupi bagi masyarakat Provinsi Bengkulu

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

IV.1 TUJUAN RENSTRA PD 2025-2029

Sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur yaitu Bengkulu Maju yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan maka Dinas Ketahanan Pangan berada pada Misi ke 4 Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berdasarkan pembangunan berkelanjutan, dengan Tujuan sasaran ke 4.1.6 Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan untuk memenuhi Indikator Indeks Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu berada pada prioritas pembangunan 6 yaitu memperkuat sektor ekonomi lokal dengan mewujudkan ketahanan pangan mandiri melalui hilirisasi dan industrialisasi produk pangan unggul melalui peningkatan ketersediaan dan ketahanan pangan mandiri serta hilirisasi pangan lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Adapun tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya dan sasaran RPJMD dengan mempertimbangkan kondisi Perangkat Daerah saat ini.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah “Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien”, dengan indikator tujuan adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Dipilihnya indikator IKP karena Penilaian IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi suatu wilayah dan memberikan gambaran peringkat (rangking) pencapaian ketahanan pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah yang lain, selain itu dapat dijadikan alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program.

IV.2 SASARAN RENSTRA PD 2025-2029

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu adalah Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan serta Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD .

Indikator sasaran perangkat daerah adalah Indek Ketahanan Pangan (IKP), Persentase Tingkat Keamanan Pangan dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) serta nilai SAKIP perangkat daerah, secara rinci dapat dilihat pada tabel 3.1 dan 3.2.berikut ini :

Tabel 3 1 Rumusan Tujuan dan Sasaran Renstra PD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu											
- Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	69,9	70,00	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	
		Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)	69,9	70	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	
			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	9,66	8,33	9,31	7,946	7,562	6,794	6,41	
		Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)	77,10	77,66	78,65	79,39	80	80,76	81,53	

Tabel 3 2 Tujuan Sasaran Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

No	Tujuan/ Sasaran		Indikator Tujuan/ Sasaran		Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada tahun ke -					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
I	Tujuan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efisien	I	Indeks Ketahanan Pangan	70	70.01	70,02	70,03	70,04	70,05
II	Sasaran	Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	I	Indeks Ketahanan Pangan	70	70.01	70,02	70,03	70,04	70,05
			2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalance of Undernourishment</i>)	8,33	9,31	7,946	7,562	6,794	6,41
		Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	I	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77,86	78,65	79,39	80	80,76	81,53

IV.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Strategi pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Upaya mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, maka dirumuskan strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Tabel 3 3 Penahapan Renstra Perangkat Daerah

Tahap I 2026	Tahap II 2027	Tahap III 2028	Tahap IV 2029	Tahap V 2030
1	2	3	4	5
Penguatan pondasi kebijakan dan identifikasi potensi pangan melalui penguatan kapasitas produksi, optimalisasi pendanaan serta akses modal untuk mendukung ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas produk pangan lokal melalui penguatan infrastruktur hilirisasi dan implementasi digitalisasi pemasaran.	Optimalisasi hilirisasi dan peningkatan daya saing produk pangan lokal melalui industrialisasi.	Penguatan konsumsi pangan lokal yang mudah di akses dan aman	Mewujudkan Masyarakat memiliki akses terhadap pangan yang cukup, aman, beragam bergizi, merata dan terjangkau hingga dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

IV.4 ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan merupakan perwujudan yang akan di laksanakan dalam mencapai Visi dan Misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah selama lima tahun yang akan datang di jabarkan pada tabel 3.4 berikut ini

Tabel 3 4 Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

Visi : Visi Bengkulu Maju Yang Religius, Sejahtera dan Berkelanjutan			
Misi : Menciptakan keselarasan pembangunan ekonomi pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata, dan pertambangan dengan mengutamakan hilirisasi yang berlandaskan pembangunan berkelanjutan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat melalui tata kelola kinerja perangkat daerah yang efektif dan efesien	1. Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan 2. Meningkatkan tata kelola kinerja perangkat daerah.	1. Mengembangkan keberagaman produk pangan lokal dengan memperkuat kapasitas produksi, serta mengoptimalkan pendanaan untuk membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, hilirisasi dan industrialisasi pangan lokal secara berkelanjutan. 2. Penguatan komitmen pimpinan dalam penyusunan indikator kinerja yang terukur dan terintegrasi.	1. Ketersediaan pangan dengan cara Peningkatan produksi pang berbasis sumber daya lokal, pengembangan infrastruktur dan penguatan sistem logistik. 2. Keterjangkauan dengan cara stabilitas harga dan pengelolaan cadangan pangan. 3. Pemanfaatan pangan meliputi diversifikasi konsumsi, pengawasan mutu dan keamanan. 4. Meningkatkan kapasitas ASN sehingga bisa menyusun rencana kerja yang jelas dan terukur serta evaluasi kinerja secara berkala.

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

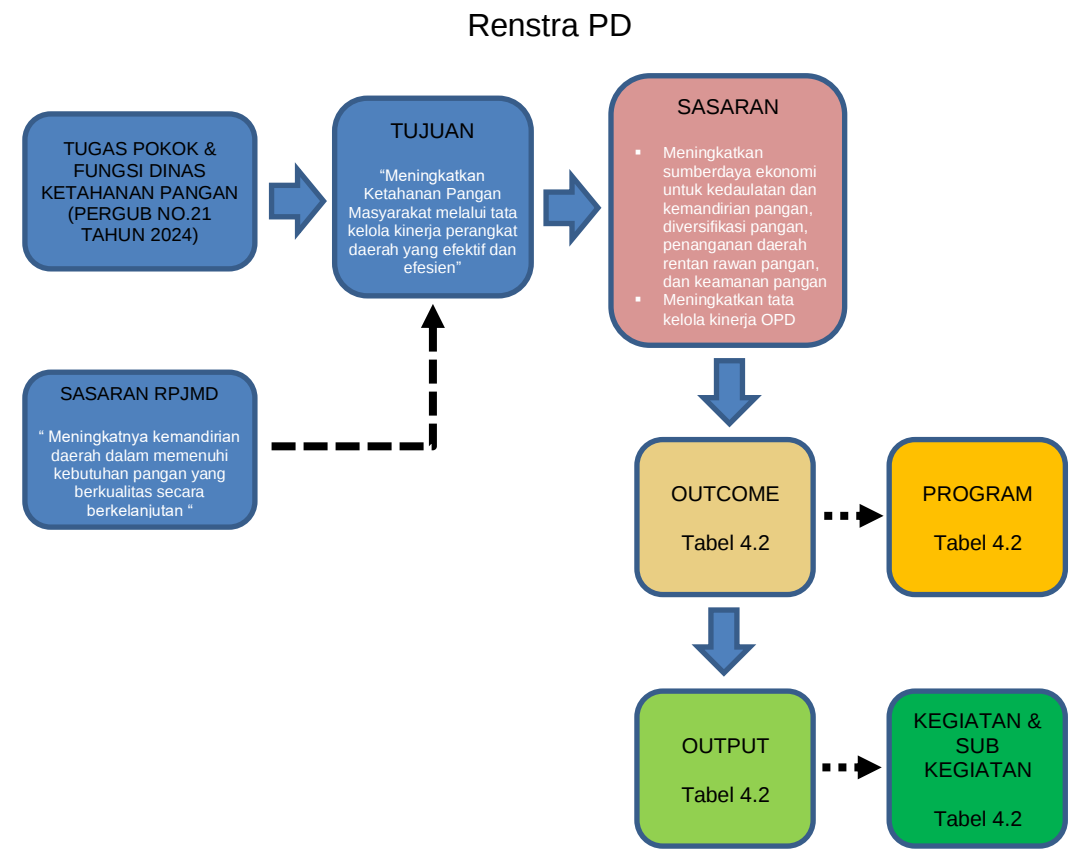
V.1 URAIAN PROGRAM

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD pemerintah Provinsi Bengkulu yang mendukung pencapaian visi, misi, dan program strategis pemerintah daerah. Dalam upaya memantapkan ketahanan pangan di Provinsi Bengkulu, dilaksanakan program sebagai berikut :

- 1. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
- 2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Kerangka perumusan program/ kegiatan/ subkegiatan Renstra Perangkat Daerah sesuai Inmendagri nomor 2 tahun 2025 di tampilkan pada gambar 4.1. Secara rinci dapat di lihat pada tabel 4.1 Program Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

Gambar 4 1 Kerangka Perumusan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan



Tabel 4 1 Program Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					8.009.745.800,00		8.232.791.881,00		8.407.791.881,00		8.472.791.881,00		8.675.837.962,00	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					7.389.745.800,00		7.522.791.881,00		7.622.791.881,00		7.622.791.881,00		7.790.837.962,00	
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	100	7.389.745.800,00	100	7.522.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.790.837.962,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN					50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (%)	1	1	2	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					295.000.000,00		345.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan (Nilai)	90,7	90,74	90,8	295.000.000,00	91,2	345.000.000,00	91,5	385.000.000,00	91,8	400.000.000,00	92,2	410.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan (Nilai)	89,5	90	90,5		90,8		91		91,5		91,8		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase cadangan pangan (%)	163,62	138,65	80	215.000.000,00	80,5	230.000.000,00	80	245.000.000,00	80,5	265.000.000,00	81	275.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,7	8	7		8		5		4		3		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					60.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00	
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	76,60	76,65	85,5	60.000.000,00	86	75.000.000,00	86,5	85.000.000,00	87	105.000.000,00	87,5	110.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pangan
TOTAL KESELURUHAN					8009745800.00		8232791881.00		8407791881.00		8472791881.00		8675837962.00	

V.2 URAIAN KEGIATAN

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa sumber daya manusi, barang, modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Setiap kegiatan terdiri beberapa sub kegiatan dan setiap kegiatan dan sub kegiatan memiliki masing-masing indikator. Adapun kegiatan dan sub kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, terdiri dari Kegiatan :
 - Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah provinsi.
Dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
 - b. Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik
 - d. Penyusunan Rencana dan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Terdiri dari Kegiatan :
 - Kegiatan Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penyediaan informasi harga pangan dan neraca bahan makan
 - b. Penyediaan pangan berbasis sumberdaya lokal
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi pemantauan stok, pasokan dan harga pangan
 - d. Pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan
 - Kegiatan Promosi pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui media provinsi, dengan Sub kegiatan :
 - a. Promosi penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdayalokal
 - b. Koordinasi dan sosialisasi pelaksanaan advokasi, edukasi, dan sosialisasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA)
 - c. Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan, terdiri dari Kegiatan :
 - Kegiatan Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi, dengan Sub Kegiatan :

- a. Penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan provinsi dan kabupaten kota
- Kegiatan Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan provinsi.
 - b. Pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, dan cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup lebih dari satu daerah kabupaten/kota dalam satu daerah.
- 4. Program Pengawasan Keamanan Pangan, terdiri dari Kegiatan:
 - Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar distribusi lintas daerah kabupaten/kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Penguatan kelembagaan keamanan pangan segar provinsi
 - b. Sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota.
 - c. Registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota
 - d. Rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan lintas daerah kabupaten/kota
 - e. Penyediaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan.

Rumusan Program Kegiatan dan Sub kegiatan RENSTRA PD di jelaskan dalam Tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4 2 Rumusan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan RENSTRA Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu							
- Meningkatnya kemandirian daerah dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan	Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat Melalui Tata Kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien	Meningkatkan Sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, diversifikasi pangan, penanganan daerah rentan rawan pangan dan keamanan pangan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Indeks Ketahanan Pangan (IKP) (Indeks)		
					Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)		
					Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (%)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	
					Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	2.09.02.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	
					Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	2.09.02.1.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
					Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan (Nilai)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
					Angka Stabilitas harga pangan	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	
					Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	
					Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	2.09.03.1.01.0011 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	
					Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	
					Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
					Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02.0006 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
					Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
					Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.02.0008 - Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	
				Jumlah Konsumsi pangan (kalori/kapita/hari)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi	
					Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	
					Persentase cadangan pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
					Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	
				Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi	
					Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	
					Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	
					Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
				Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen) Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat) Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat) Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen) Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen) Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan 2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan 2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2.09.05.1.01.0010 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan 2.09.05.1.01.0011 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Angka)		
			Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel		Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, umum) yang sesuai standar (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.09.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.09.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	2.09.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.09.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	2.09.01.1.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.09.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.09.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.09.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.09.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Layanan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Layanan pelaksanaan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

V.3 URAIAN SUBKEGIATAN BESERTA KINERJA, INDIKATOR, TARGET, DAN PAGU INDIKATIF

Selengkapnya dapat di lihat pada Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan RENSTRA tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu.

Tabel 4 3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				8.009.745.800,00		8.232.791.881,00		8.407.791.881,00		8.472.791.881,00		8.675.837.962,00		
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				7.389.745.800,00		7.522.791.881,00		7.622.791.881,00		7.622.791.881,00		7.790.837.962,00		
Meningkatnya dukungan administrasi dan operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel	Persentase layanan administrasi (keuangan, barang milik daerah, kepegawalan, umum) yang sesuai standar (%)	100	100	7.389.745.800,00	100	7.522.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.622.791.881,00	100	7.790.837.962,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	
	Persentase kelengkapan dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
2.09.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00	6	150.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10		10		10		10		10			
2.09.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00	5	75.000.000,00		
2.09.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tertindakannya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00	6	50.000.000,00		
2.09.01.1.01.0008 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tertindakannya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00		
2.09.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.374.245.800,00		6.507.291.881,00		6.507.291.881,00		6.507.291.881,00		6.640.337.962,00		
Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	47	48	6.374.245.800,00	48	6.507.291.881,00	48	6.507.291.881,00	48	6.507.291.881,00	49	6.640.337.962,00		
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.253.165.800,00		6.386.211.881,00		6.386.211.881,00		6.386.211.881,00		6.519.257.962,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	47	48	6.253.165.800,00	48	6.386.211.881,00	48	6.386.211.881,00	48	6.386.211.881,00	49	6.519.257.962,00		
2.09.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan				71.080.000,00		71.080.000,00		71.080.000,00		71.080.000,00		71.080.000,00		
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	12	71.080.000,00	12	71.080.000,00	12	71.080.000,00	12	71.080.000,00	12	71.080.000,00		
2.09.01.1.02.0006 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	0	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.09.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada				49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
Perangkat Daerah														
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00		
2.09.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada				49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		49.000.000,00		
SKPD														
Tertaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00	12	49.000.000,00		
2.09.01.1.05 - Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Layanan Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawal Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				246.000.000,00		246.000.000,00		296.000.000,00		296.000.000,00		321.000.000,00		
Layanan Administrasi Umum Perkantoran	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	246.000.000,00	5	246.000.000,00	5	296.000.000,00	5	296.000.000,00	5	321.000.000,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5		5		5		5		5		5	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10		10		10		10		10			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1					
2.09.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.09.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20.000.000,00		20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.09.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	10	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00	10	8.000.000,00		
2.09.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.09.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00		
2.09.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00		
2.09.01.1.06.0006 - Fasilitas Kunjungan Tamu				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
2.09.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				149.000.000,00		149.000.000,00		169.000.000,00		169.000.000,00		169.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	149.000.000,00	25	149.000.000,00	25	169.000.000,00	25	169.000.000,00	25	169.000.000,00		
2.09.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00		426.500.000,00		
Layanan pelaksanaan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	426.500.000,00	12	426.500.000,00	12	426.500.000,00	12	426.500.000,00	12	426.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	14		14		14		14		14			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
2.09.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	12	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00	12	1.500.000,00		
2.09.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		67.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00	12	67.000.000,00		
2.09.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		340.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	14	14	340.000.000,00	14	340.000.000,00	14	340.000.000,00	14	340.000.000,00	14	340.000.000,00		
2.09.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				141.000.000,00		141.000.000,00		191.000.000,00		191.000.000,00		201.000.000,00		
Layanan pelaksanaan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	141.000.000,00	3	141.000.000,00	3	191.000.000,00	3	191.000.000,00	3	201.000.000,00		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25		25		25		25		25			
2.09.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	25	25	110.000.000,00	25	110.000.000,00	25	110.000.000,00	25	110.000.000,00	25	110.000.000,00		
2.09.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00	3	6.000.000,00		
2.09.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				25.000.000,00		25.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tertindakannya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00		
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi (%)	1	2	50.000.000,00	3	60.000.000,00	3	70.000.000,00	4	80.000.000,00	4	90.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	
2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Persentase Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	0	3		3		3		3		3			
2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				45.000.000,00		55.000.000,00		65.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia (Unit)	0	3	45.000.000,00	3	55.000.000,00	3	65.000.000,00	3	75.000.000,00	3	85.000.000,00		
2.09.02.1.01.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertindakannya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.02.1.01.0006 - Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				295.000.000,00		345.000.000,00		385.000.000,00		400.000.000,00		410.000.000,00		
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan (Nilai)	90,7	90,8	295.000.000,00	91,2	345.000.000,00	91,5	385.000.000,00	91,8	400.000.000,00	92,2	410.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	
	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan (Nilai)	89,5	90,5		90,6		91		91,5		91,6			
2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				265.000.000,00		305.000.000,00		335.000.000,00		340.000.000,00		350.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Angka Stabilitas harga pangan	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1	265.000.000,00	1	305.000.000,00	1	335.000.000,00	1	340.000.000,00	1	350.000.000,00		
	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	23	12		13		13		13					
	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2	2		2		2		2					
	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1		1		1		1					
2.09.03.1.01.0002 - Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia (Laporan)	2	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00		
2.09.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				197.000.000,00		217.000.000,00		227.000.000,00		227.000.000,00		237.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Dokumen)	23	12	197.000.000,00	12	217.000.000,00	13	227.000.000,00	13	227.000.000,00	13	237.000.000,00		
2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.09.03.1.01.0011 - Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan (Unit)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi (Laporan)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.03.1.01.0013 - Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)				5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM) (Dokumen)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Jumlah Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi (Ton)	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	7	5		5		5		5					
	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	1	1		1		1		1					
2.09.03.1.02.0002 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.02.0005 - Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara (Ton)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.02.0006 - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.02.0007 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00		
Tertaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Ton)	7	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00	5	6.000.000,00		
2.09.03.1.02.0006 - Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi				20.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Jumlah Konsumsi pangan (kalori/kapita/hari)	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2	2	20.000.000,00	2	30.000.000,00	2	40.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.09.03.1.04.0001 - Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal				13.000.000,00		15.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		23.000.000,00		
Tertaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal (Dokumen)	2	2	13.000.000,00	2	15.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00	2	23.000.000,00		
2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)				5.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) (Laporan)	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.03.1.04.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.03.1.04.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				215.000.000,00		230.000.000,00		245.000.000,00		265.000.000,00		275.000.000,00		
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan (%)	11,7	7	215.000.000,00	6	230.000.000,00	5	245.000.000,00	4	265.000.000,00	3	275.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	
	Persentase cadangan pangan (%)	163,62	50		50,5		60		60,5		61			
2.09.04.1.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan kewenangan provinsi	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.04.1.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota				20.000.000,00		25.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi				195.000.000,00		205.000.000,00		215.000.000,00		235.000.000,00		245.000.000,00		
Penanganan kerawanan pangan kewenangan provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	7	7	195.000.000,00	7	205.000.000,00	7	215.000.000,00	7	235.000.000,00	7	245.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi				174.000.000,00		179.000.000,00		189.000.000,00		209.000.000,00		219.000.000,00		
Tertaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi (Dokumen)	7	7	174.000.000,00	7	179.000.000,00	7	189.000.000,00	7	209.000.000,00	7	219.000.000,00		
2.09.04.1.02.0004 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tertaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi (Laporan)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi				20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				60.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (%)	76,60	85,5	60.000.000,00	86	75.000.000,00	86,5	85.000.000,00	87	105.000.000,00	87,5	110.000.000,00	2.09.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu	
2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota				60.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		105.000.000,00		110.000.000,00		
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	60.000.000,00	1	75.000.000,00	1	85.000.000,00	1	105.000.000,00	1	110.000.000,00		
	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	5	5		5		5		5					
	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1		1		1		1					
	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	1	1		1		1		1					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan				30.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		45.000.000,00		
Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Sertifikat)	5	5	30.000.000,00	5	35.000.000,00	5	35.000.000,00	5	45.000.000,00	5	45.000.000,00		
2.09.05.1.01.0007 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.05.1.01.0008 - Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				10.000.000,00		15.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan (Dokumen)	1	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	20.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.09.05.1.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
2.09.05.1.01.0010 - Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				17.000.000,00		22.000.000,00		27.000.000,00		32.000.000,00		37.000.000,00		
Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	17.000.000,00	1	22.000.000,00	1	27.000.000,00	1	32.000.000,00	1	37.000.000,00		
2.09.05.1.01.0011 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		

V.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA Mendukung PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah RENSTRA Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2026-2029 di tampilkan pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4 4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu				
1.	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	2.09.02.1.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi 2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
2.	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	2.09.03.1.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan 2.09.03.1.01.0006 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga 2.09.03.1.01.0009 - Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi 2.09.03.1.04 - Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi 2.09.03.1.04.0002 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	
3.	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	2.09.04.1.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi 2.09.04.1.02.0002 - Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2.09.04.1.02.0005 - Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	
4.	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	2.09.05.1.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2.09.05.1.01.0006 - Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	

V.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERANGKAT DAERAH

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Ketahanan Pangan 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat di lihat pada tabel 4.5 berikut ini

Tabel 4 5 Tabel Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.09.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu									
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka	77,10	77,86	78,65	79,39	80	80,76	81,53	
3.	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	Indeks	69,9	70	70,01	70,02	70,03	70,04	70,05	
4.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,86	8,33	9,31	7,946	7,562	6,794	6,41	

V.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK).

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 Renstra Dinas Ketahanan Pangan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) di tampilkan dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4 6 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN										
2.	Persentase cadangan pangan	positif	%	163,62	138,65	50	50,5	60	60,5	61	
3.	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	negatif	%	11,7	8	7	6	5	4	3	

BAB V

P E N U T U P

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu tahun 2025 – 2029 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang telah disusun dalam dokumen Rencana Strategis OPD yang merujuk pada Dokumen RPJMD 2025-2029. Dengan disusunnya dokumen Renstra ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dapat berjalan lancar, sehingga mempermudah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan Provinsi Bengkulu.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu Tahun 2025- 2029 ini masih perlu disempurnakan dan dilengkapi terkait dalam persiapan, pelaksanaan, pengendalian anggaran dalam rangka mendukung program ketahanan pangan. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan juga sebagai acuan semua bidang yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu. Agar tercapainya tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Bengkulu, maka perlu dilakukan monitoring, pengendalian, dan evaluasi terhadap rencana, pelaksanaan, dan hasil kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2025-2029.